Tantangan Pendidikan Inklusi Dalam Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus

Rizka Norsy Ramadhana

Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

Universitas Lambung Mangkurat

Email : rizkanorsy@gmail.com

Abstrak :

Pendidikan Inklusi merupakan salah satu program pemerintah dalam mewujudkan keadilan di bidang pendidikan. Pendidikan Inklusi menjadi salah satu bentuk perwujudan pemerataan pendidikan tanpa diskriminasi. Dalam pendidikan inklusi, anak berkebutuhan khusus (ABK) harus mendapatkan layanan pendidikan yang sama dengan anak normal di sekolah reguler. Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan studi literature. Metode penelitian ini menggunakan studi pustaka yang bersumber dari buku, jurnal dan lainnya. Dalam pelaksanaannya terdapat berbagai tantangan yang menjadi hambatan pendidikan inklusi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tantangan yang dihadapi antara lain; kurangnya keterampilan dan sikap guru dalam menangani ABK, keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya kesadaran orang tua dan masyarakat terhadap hak anak berkebutuhan khusus.

Kata Kunci : anak berkebutuhan khusus, pendidikan inklusi, tantangan penyelenggaraan pendidikan inklusi

Abstract :

Inclusive education is one of the government programs in realizing justice in the field of education. Inclusive education is a form of equal distribution of education without discrimination. In inclusive education, children with special needs (ABK) must get the same educational services as normal children in regular schools. To obtain the necessary data, researchers used literature studies. This research method uses literature study sourced from books, journals and others. In its implementation, there are various challenges that become obstacles to inclusive education. The purpose of this study was to determine the challenges faced, among others; lack of skills and attitudes of teachers in dealing with children with special needs, limited facilities and infrastructure and low awareness of parents and the community towards the rights of children with special needs.

Keywords: children with special needs, inclusive education, challenges in implementing inclusive education

PENDAHULUAN :

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 Pasal 32 ayat 1 yang bunyinya “pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan / atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”. Pendidikan merupakan salah satu bentuk usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Di Indonesia sendiri praktik penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus telah diselenggarakan oleh Lembaga-lembaga Sosial Masyarakat (LSM) maupun kelompok-kelompok keagamaan sejak 1901. Pendidikan sangat dibutuhkan bagi anak-anak untuk mencapai kesejahteraan sosial dan hidupnya. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan tak terkecuali anak-anak yang segi fisik maupun mental nya kurang atau berbeda dari anak normal lainnya. Pemerintah telah bertindak menyediakan fasilitas pendidikan khusus bagi para anak berkebutuhan khusus (ABK). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 5 Ayat 1, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 32 ayat 1 UU No. 20 tahun 2003, pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang

memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan / atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Dilanjutkan pada ayat 2, pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau keterbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan / atau yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Dalam perwujudan dari pasal diatas pemerintah telah membentuk Sekolah Luar Biasa (SLB). Akan tetapi SLB dianggap sebagai tembok pemisah antara anak-anak pada umumnya dan anak yang berkebutuhan khusus. Dalam mengatasi masalah ini perlu disediakan berbagai layanan pendidikan yang sesuai dengan anak berkebutuhan khusus, baik dari sarana dan prasarana, guru, serta lingkungan. Bagi anak berkebutuhan khusus, pendidikan inklusi memiliki peran memberi kesempatan mereka untuk belajar bersama siswa-siswa lain seusianya yang tidak berkebutuhan khusus. Sekolah inklusi merupakan sekolah yang dianggap tepat bagi anak berkebutuhan khusus. Pratiwi dalam (Ilahi, 2013: 25), menjelaskan bahwa sekolah inklusi adalah sekolah reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan anak yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat

istimewa pada satu kesatuan yang sistemik. Sekolah inklusi juga memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus agar dapat mengenyam pendidikan yang adil.

Agar terciptanya keberlangsungan pendidikan inklusi perlu adanya faktor pendukung yang paling penting yaitu partisipasi dari semua komponen didalamnya meliputi kepala sekolah, guru, orang tua, masyarakat, bahkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah seperti ketersediaan petugas kesehatan dan lainnya. Kolaborasi antara sekolah dan komunitas juga menjadi kunci keberhasilan pendidikan inklusif (Amka, 2019). Namun dalam pelaksanaannya, pendidikan inklusi tidak berjalan lancar seperti yang di bayangkan. Terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang harus dihadapi baik dari dalam maupun luar sekolah. Amka (dalam Ainscow dan Haile-Giorgis (1999), menjelaskan bahwa ketika orang mendorong langkah menuju praktik pendidikan yang lebih inklusif, mereka juga harus realistis dengan hambatan yang akan dihadapi. Tantangan dan hambatannya berasal dari siswa, guru, orang tua, masyarakat, sekolah, dll.

METODE :

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan berupa penelitian Studi Kepustakaan (Library

Research). Sarwono (2006) menjelaskan Studi kepustakaan juga bisa dilakukan dengan mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Selain itu menurut Nazir (2003 : 111), Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku- buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Peneliti melakukan penelitian teoritis terkait topik penelitian dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari literatur yang relevan. Jadi bisa disimpulkan bahwa penelitian menggunakan studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang bisa didapatkan dari buku, jurnal, karya tulis, website, berita, dan sumber lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Penyeleggaran Sekolah Inklusi

Sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan

menyelenggarakan suatu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan undang-undang. Dalam pasal tersebut disebutkan “setiap warga negara” berhak mendapatkan pendidikan, dengan kata lain anak berkebutuhan khusus termasuk didalamnya. Pendidikan juga merupakan kebutuhan bagi manusia. Selain anak yang normal, anak berkebutuhan khusus juga membutuhkan pendidikan yang sama. Berdasarkan Karakter yang berlandaskan falsafah Pancasila dikutip dari buku Filsafah Pendidikan (Amka, 2019), karakter kemanusiaan seseorang tercermin antara lain dalam pengakuan atas persamaan derajat, hak, dan kewajiban; saling mencintai; memiliki tenggang rasa; tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain; gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 5 Ayat 1, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang

sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 Pasal 32 ayat 1, pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan / atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pada ayat 2, dijelaskan bahwa pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau keterbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan / atau yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Mengutip dari Pratiwi (2015), hak atas pendidikan juga termasuk dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 1948 (The 1948 Universal Declaration of Human Right), yang kemudian diperbarui pada Konferensi Dunia 1990 tentang Pendidikan untuk Semua (The 1990 World Conference on Education for All), tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hak-hak ini berlaku untuk semua orang, terlepas dari perbedaan individu.

Berdasarkan hak hak tersebut, anak berkebutuhan khusus wajib mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan. Seperti yang dijelaskan Amka (2017) dengan menyatukan ke dalam ruang kelas yang sama, akan memberikan pengertian kepada peserta didik bahwa dalam kehidupan akan ditemui banyak sekali perbedaan. Perbedaan-perbedaan itu diharapkan menjadi sebuah kenyataan yang harus dihadapi dan dihormati, bukan dijadikan sebagai hambatan. Anak berkebutuhan khusus harus mendapatkan hak yang sama dengan anak yang normal. Hal ini sesuai dengan program pemerintah yang bernama pendidikan inklusi.

2. Tantangan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi tidak semudah membalikan telapak tangan. Terdapat banyak tantangan yang dihadapi baik dari dalam maupun luar sekolah. Tantangan ini akan menjadi hambatan dalam terciptanya pendidikan inklusi yang baik. Hambatan yang pertama adalah dari tenaga pengajar atau guru. Guru memiliki peranan penting dalam mendidik di

pendidikan inklusi. Pendidikan inklusif yang terjadi di Indonesia masih mengalami hambatan, hambatan yang terjadi selama ini adalah kurangnya pengetahuan guru tentang anak berkebutuhan khusus, minimnya keterampilan guru dalam menangani ABK dan sikap guru terhadap ABK yang dilihat masih memandang sebelah mata (Juwono & Kumara, 2011). Sikap guru terhadap pendidikan inklusif didefinisikan sebagai kecenderungan untuk berespon secara kognitif, afektif, dan konatif terhadap pendidikan inklusif (Mahat, 2008). Winarti (2015) menyebutkan kondisi guru belum didukung dengan kualitas guru yang memadai. Keberadaan guru khusus masih dinilai belum sensitif dan proaktif terhadap permasalahan yang dihadapi ABK. Winarti juga menyebutkan bahwa guru belum didukung dengan kejelasan aturan tentang peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing guru. Pelaksanaan tugas belum disertai dengan diskusi rutin, tersedianya model kolaborasi sebagai panduan, serta dukungan anggaran yang memadai (Winarti, 2015).

Selain guru, dalam penyelenggaraan pendidikan

inklusi dibutuhkan sarana dan prasarana yang baik. Tapi dalam kenyataannya masih terbatasnya sarana dan prasarana tersebut. Memang dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi membutuhkan sarana dan prasarana yang banyak. Hal ini karena sekolah harus menyesuaikan dengan berbagai jenis kebutuhan anak berkebutuhan khusus yang berbeda-beda seperti alat bantu dengar, buku timbul, dan sebagainya yang harus disesuaikan dengan kondisi ABK. Dengan keterbatasan ini mempengaruhi kurangnya sekolah dalam pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus. Masalah utama minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki adalah faktor biaya (Pratiwi, 2015).

Rendahnya kesadaran orang tua dan masyarakat terhadap hak anak berkebutuhan khusus menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Amka (dalam Holden 1995) menyebutkan Sikap dan perilaku orang tua memengaruhi perilaku anak-anak mereka, yang kemudian dibawa ke kehidupan selanjutnya. Teori ini menunjukkan bahwa orang tua yang tidak mendukung pendidikan inklusif

dapat memengaruhi secara negatif pembentukan sikap dan perilaku anak mereka (Amka, 2019). Apabila orang tua mendukung penuh anaknya yang berkebutuhan khusus, ini sangat memungkinkan anak tersebut mencapai potensi maksimalnya. Danielsen, Samdal, Hetland dan Wold (2009) menyatakan Dukungan dari ibu dapat memunculkan perasaan berharga pada anak, sementara dukungan dari ayah dapat mengembangkan kompetensi anak.

Selain orang tua, peranan masyarakat juga penting dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Orang tua dan masyarakat adalah lingkungan terdekat yang memiliki peranan penting. Sikap menerima dan mendukung kekurangan anak dari orang tua dan masyarakat dapat mendorong anak lebih dalam mengembangkan potensinya. Jika orang tua dan masyarakat tidak menerima dan mendukung maka kemajuan anak berkebutuhan khusus akan semakin terhambat. Anak berkebutuhan khusus akan cenderung malu dan cemas untuk memulai melakukan sesuatu.

Sayangnya dikeadaan nyata saat ini, orang tua masih ragu

bahkan takut untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah reguler. Alasannya mulai dari takut anak tidak mampu, takut ada diskriminasi, dan lainnya. Selain itu masyarakat juga kurang peduli tentang keberadaan anak berkebutuhan khusus dan terkesan membedakan antara anak normal dan ABK.

3. Sikap Terhadap Tantangan Pendidikan Inklusi

Pengembangan kemampuan dan model mengajar guru diperlukan untuk mendukung pendidikan inklusi. Pelatihan mengenai pendidikan inklusif pada guru-guru juga merupakan faktor yang dapat memengaruhi sikap pada pendidikan inklusif. Hasil penelitian ini adalah guru yang pernah mengikuti pelatihan pendidikan inklusif memiliki sikap positif yang tinggi dibandingkan guru-guru yang tidak pernah mengikuti pelatihan (Dewi, Tiatri dan Mularsih, 2020). Dewi, Tiatri dan Mularsih (dalam Subban dan Sharma, 2006) melaporkan bahwa guru yang pernah mengikuti pelatihan tentang mengajar peserta didik berkebutuhan khusus memiliki sikap yang lebih positif

dibandingkan guru yang tidak mengikuti pelatihan.

Keterbatasan sarana dan prasarana yang dihadapi sekolah dalam mewujudkan pendidikan inklusi yang baik. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah untuk memberikan bantuan berkaitan dengan fasilitas untuk sekolah inklusi (Konza, 2008). Pemerintah juga harus menyiapkan dana untuk sarana dan prasarana di sekolah reguler untuk anak berkebutuhan khusus. Pratiwi (2015), menyatakan kepala sekolah bisa membuat proposal pengajuan dana kepada pemerintah yang terkait. Komunikasi yang baik antara sekolah dan pemerintah ini diharapkan berdampak positif bagi kemajuan penyelenggaraan sekolah inklusi. Sehingga anak berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan yang maksimal.

Untuk menyadarkan orang tua dan masyarakat diperlukan peranan sekolah dan lembaga lembaga terkait. Orang tua dan masyarakat perlu diberikan wawasan tentang hak setiap anak dalam belajar, termasuk anak berkebutuhan khusus. Amka (2019) menyatakan bahwa sikap para orang tua berubah setelah

mendapatkan sosialisasi dari pihak sekolah tentang pendidikan inklusif dan telah memahami prinsip keragaman kebutuhan belajar anak. Hal ini diharapkan dapat merubah pandangan masyarakat terhadap pendidikan yang adil untuk anak berkebutuhan khusus.

KESIMPULAN

Anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak yang sama dengan anak normal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 5 Ayat 1, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Anak berkebutuhan khusus wajib mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa adanya diskriminasi. Pendidikan inklusi berperan sebagai pembentuk persamaan hak memperoleh pendidikan yang sama terhadap semua warga negara. Anak berkebutuhan khusus bisa sekolah bersama anak yang normal di sekolah reguler untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Dalam pendidikan inklusi terdapat berbagai tantangan yang menjadi

hambatan dalam pelaksanaannya. Kurangnya keterampilan dan sikap guru dalam menangani ABK padahal guru adalah elemen penting dalam pendidikan. Selain itu minimnya biaya mengakibatkan keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah reguler. Rendahnya kesadaran orang tua dan masyarakat terhadap hak anak berkebutuhan khusus mengakibatkan rasa malu dan cemas ABK dalam mengembangkan potensinya.

Pengembangan kemampuan dan model mengajar guru diperlukan untuk mendukung pendidikan inklusi. Pelatihan mengenai pendidikan inklusif pada guru-guru juga merupakan faktor yang dapat memengaruhi sikap pada pendidikan inklusif. Dukungan dana dari pemerintah sangatlah penting, sekolah harus aktif dalam pengajuan proposal agar sarana dan prasarana untuk ABK bisa terpenuhi. Peranan sekolah dan lembaga lembaga terkait untuk memberikan wawasan terhadap orang tua dan masyarakat sangat dibutuhkan. Dengan melakukan sosialisasi, diharapkan dapat merubah pandangan masyarakat terhadap pendidikan yang adil untuk anak berkebutuhan khusus.

REFERENSI

Amka, (2019), Buku Ajar Filsafat Pendidikan, Gagasan Konsep, Teori dan Analisis Filosofis

Mengenai Sistem Pendidikan. Nizamia Learning Center, Sidoarjo.
Amka, A (2019). Sikap Orang Tua Terhadap Pendidikan Inklusif,

- Madrosatuna: Journal of Islamic Elementary School*, Vol. 1 (1). 15-27. doi: 10.21070/madrosatuna.v3i1.2068
- Amka, A. (2019). Pendidikan Inklusif Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus di Kalimantan Selatan. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 4(1), 86 - 101.
- Amka, A. (2017). Implementasi Pendidikan Karakter Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Reguler, *Madrosatuna: Journal of Islamic Elementary School*, Vol. 1 (1). 1-12. doi: 10.21070/madrosatuna.v1i1.1206
- Budianto, (2007). Pengantar Pendidikan Inklusif. Prenadamedia Goup, Jakarta.
- Danielsen, A. G., Samdal, O., Hetland, J., & Wold, B. (2009). School-related social support and students' perceived life satisfaction. *The Journal of educational research*, 102(4), 303-320.
- Dewi, T. T. U., Tiatry, S., & Mularsih, H. (2020). PERAN PENGETAHUAN AWAL TENTANG ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DAN EFIKASI GURU TERHADAP SIKAP GURU PADA PENDIDIKAN INKLUSIF. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 4(2), 304-314.
- Juwono, I. D & Kumara, A. (2011). Pelatihan Penyusunan Rancangan Pembelajaran pada Guru Sekolah Inklusi. Studi Kasus Pada SD "X" di Yogyakarta.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2003). Undang-undang No. 20/2003 tentang system pendidikan nasional. Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional
- Konza, D. (2008). Inclusion of students with disabilities in new times: responding to the challenge.
- Mahat, M. (2008). The Development Of A Psychometrically-Sound Instrument To Measure Theacher's Multidimensional Attitudes Toward Inclusive Education. *International Journal Of Special Education*, 23(1)
- Palmer, D. S., K. Fuller, T. Arora, and M. Nelson. 2001. "Taking Sides: Parent Views on Inclusion for Their Children with Severe Disabilities." *Exceptional Children* 67: 467-484.
- Pratiwi, J. C. (2015, November). Sekolah inklusi untuk anak berkebutuhan khusus: tanggapan terhadap tantangan kedepannya. In *Seminar Nasional Ilmu Pendidikan UNS 2015*. Sebelas Maret University.

Sari, M., & Asmendri, A. (2020).
Penelitian Kepustakaan (Library
Research) dalam Penelitian
Pendidikan IPA. *NATURAL
SCIENCE: Jurnal Penelitian
Bidang IPA dan Pendidikan
IPA*, 6(1), 41-53.